



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : IDA BAGUS PUTU MARDANA
- Jabatan** : WAKIL DEKAN III
- NHK** : 817007

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **560.000.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 50 m²/10 m² di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 20 m²/10 m² di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/36 m² di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **237.000.000**

- MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO HONDA VARIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
- MOBIL, HONDA VARIO HONDA VARIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO PCX HONDA VARIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
- MOTOR, YAMAHA YAMAHA FELANO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **15.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **3.841.093**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	815.841.093
III. HUTANG	Rp.	465.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	350.841.093

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.